

Pokja Perhutanan Sosial Banten Perkuat Koordinasi untuk Percepatan Penerbitan SK



Sambutan Ketua Pelaksana dan Paparan Materi



Paparan Materi dari Ditjen Perhutanan Sosial dan BAPPEDA Banten

Upaya percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Provinsi Banten terus didorong melalui berbagai langkah strategis, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait proses dan mekanisme percepatan legalitas pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat.

Rapat fasilitasi tersebut diikuti oleh berbagai perwakilan instansi pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta pihak terkait yang memiliki peran dalam mendukung program perhutanan sosial. Melalui forum ini, peserta mendapatkan berbagai informasi, pemaparan strategi, serta ruang diskusi yang konstruktif guna mendorong percepatan penerbitan SK Perhutanan Sosial bagi kelompok masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Perhutanan sosial sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Dengan adanya legalitas melalui SK Perhutanan Sosial, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal tanpa merusak ekosistem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan komunitas di sekitar hutan.

Dalam kegiatan tersebut, hadir narasumber dari Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial yang memberikan pemaparan mendalam mengenai strategi percepatan penerbitan SK Perhutanan Sosial. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada pentingnya kesiapan kelompok masyarakat, kelengkapan administrasi, serta pemahaman terhadap mekanisme pengajuan perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Narasumber juga menjelaskan bahwa proses penerbitan SK Perhutanan Sosial memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat pemohon. Tanpa adanya sinergi yang kuat, proses administrasi dan verifikasi lapangan dapat memakan waktu lebih lama. Oleh karena itu, kegiatan

fasilitasi seperti ini menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi serta mempercepat proses pengajuan hingga terbitnya SK.

Selain membahas aspek teknis penerbitan SK, forum tersebut juga mengangkat pentingnya penguatan kelembagaan kelompok masyarakat yang akan mengelola kawasan perhutanan sosial. Kelompok yang memiliki struktur organisasi yang jelas, tata kelola yang baik, serta rencana pengelolaan yang matang akan lebih siap dalam menjalankan program perhutanan sosial secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten turut memberikan paparan mengenai pentingnya sinergitas program kerja antar OPD di wilayah perhutanan sosial. Menurutnya, keberhasilan program perhutanan sosial tidak hanya bergantung pada satu instansi saja, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai sektor pembangunan.

Program-program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, penguatan kapasitas kelompok, hingga pendampingan teknis pengelolaan hutan perlu dilakukan secara terintegrasi oleh berbagai OPD terkait. Dengan adanya sinergi lintas sektor, masyarakat pengelola perhutanan sosial tidak hanya memperoleh akses legal terhadap hutan, tetapi juga mendapatkan dukungan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Perhutanan sosial di Provinsi Banten memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan, program ini juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan hutan, serta meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan.

Melalui pengelolaan yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, mengembangkan usaha berbasis kehutanan, hingga memanfaatkan potensi ekowisata yang ada di kawasan hutan. Dengan demikian, hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam semata, tetapi juga sebagai ruang kehidupan yang mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Kegiatan fasilitasi rapat Pokja ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam proses pengajuan dan penerbitan SK Perhutanan Sosial. Beberapa tantangan yang kerap muncul antara lain terkait kelengkapan dokumen administrasi, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengajuan izin, serta koordinasi antar instansi yang masih perlu diperkuat.

Melalui diskusi yang berlangsung secara interaktif, para peserta rapat dapat saling bertukar pengalaman, memberikan masukan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Harapannya, setelah kegiatan ini, proses percepatan penerbitan SK Perhutanan Sosial dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Banten sendiri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program perhutanan sosial sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Melalui berbagai program pendampingan, pelatihan, serta penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendamping, serta masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program perhutanan sosial. Tanpa adanya kerja sama yang kuat, tujuan besar untuk menciptakan pengelolaan hutan yang adil, lestari, dan berkelanjutan akan sulit tercapai.

Melalui kegiatan fasilitasi ini, diharapkan tercipta komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk terus mendorong percepatan penerbitan SK Perhutanan Sosial di Provinsi Banten. Dengan semakin banyaknya kelompok masyarakat yang memperoleh legalitas pengelolaan hutan, maka manfaat program perhutanan sosial dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Ke depan, percepatan penerbitan SK Perhutanan Sosial diharapkan tidak hanya menjadi target administratif semata, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam membangun tata kelola hutan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang.